



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-69/PK/2026 21 Juli 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal  
(KEM PPKF) Tahun 2027 Pemutakhiran

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota di Indonesia

Sehubungan dengan Surat Kami Nomor S-48/PK/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Penyampaian KEM PPKF Tahun 2027 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2027 serta sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bersama ini Kami sampaikan KEM PPKF Tahun 2027 hasil pemutakhiran yang dapat diunduh pada tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=77745>.

KEM PPKF hasil pemutakhiran merupakan dokumen yang telah disinkronkan dengan pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun 2027. KEM PPKF Tahun 2027 hasil pemutakhiran antara lain memuat kebijakan belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tercantum pada Bab IV tentang Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2027. Kemudian, pada Bab V tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2027 yang tertuang dalam KEM PPKF Regional beserta lampiran (Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan) yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan good governance, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman [satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id). Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime di nomor Whatsapp: 0813-1000-4134, Telepon: 134, Email: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Nufransa Wira Sakti

